



## **WALI KOTA SORONG**

### **PENGUMUMAN**

NOMOR: 800.1.2/1059/BKPSDM/2024

### **TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SORONG FORMASI TAHUN 2021**

Dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sorong dengan menggunakan Formasi Tahun 2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 234 Tahun 2024 Tanggal 25 April 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Tahun 2024. Maka Pemerintah Kota Sorong membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **I. ALOKASI KEBUTUHAN PNS**

##### **A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PNS**

Alokasi kebutuhan PNS Pemerintah Kota Sorong dengan menggunakan Formasi Tahun 2021 sejumlah 286 (dua ratus delapan puluh enam) sebagaimana dalam lampiran I.

##### **B. JENIS FORMASI PNS**

Jenis formasi untuk pengadaan PNS dengan menggunakan formasi tahun 2021 terdiri dari:

1. Orang Asli Papua (OAP); dan
2. Non Orang Asli Papua (Non OAP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menyebutkan bahwa Orang Asli Papua (OAP) adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Tanah Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sorong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kota Sorong bahwa untuk Orang Asli Papua dikategorikan sebagai berikut:

1. Kategori I, yang kedua orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua;
2. Kategori II, yang salah satu dari orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua;
3. Kategori III, orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua; dan
4. Kategori IV, selain angka 1, angka 2 dan angka 3 yang orang yang lahir dan/atau besar di Papua.

##### **C. KRITERIA PESERTA**

Peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan PNS formasi CPNS tahun 2021 memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat dengan kriteria:

1. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli dalam Kota Sorong;
2. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam Kota Sorong;
3. Kategori III orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua, yaitu orang yang diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat;
4. Kategori IV orang yang lahir dan/atau besar di Papua; dan
5. Non-OAP.

#### **D. PERSENTASE FORMASI PNS**

1. Orang Asli Papua (OAP) paling banyak 70% dari jumlah formasi yang terdiri dari:
  - a. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli dalam Kota Sorong paling banyak 60% (enam puluh persen);
  - b. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam Kota Sorong paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. Kategori III dan/atau Kategori IV paling banyak 10% (sepuluh persen).
2. Persentase selebihnya dari persentase pada angka 1 digunakan untuk formasi Non Orang Asli Papua (Non OAP);
3. Jumlah formasi jabatan untuk yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA/Sederajat paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total formasi.

## **II. PERSYARATAN**

### **A. Persyaratan Umum Bagi Seluruh Pelamar**

Bagi seluruh pelamar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun 00 (nol-nol) hari terhitung pada saat mendaftar. Batas usia tersebut ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN, BUMD);
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibuktikan dengan;
  - a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keagamaan;
  - b. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga

- Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- c. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
  - d. Akreditasi program studi/ perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
  - e. Informasi Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diperoleh dari:
    1. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan; atau
    2. pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
9. Transkrip/daftar nilai asli SMA/ Sederajat
  10. Transkrip Nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip Nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
  11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/ lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
  12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Kota Sorong;
  13. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Sorong dan tidak mengajukan pindah keluar dari Kota Sorong dengan alasan pribadi paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;
  14. Memiliki KTP Kota Sorong;
  15. Memiliki surat keterangan telah berdomisili di Kota Sorong minimal 2 (dua) tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik setempat.
  16. Dikecualikan dari ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud pada angka 3 bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter spesialis, dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar.

## **B. Persyaratan Khusus**

### **1. Bagi Pelamar Orang Asli Papua (OAP)**

- a. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua dalam Kota Sorong, dibuktikan dengan melampirkan:
  - 1) Akte Kelahiran;
  - 2) Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/ Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong yang terdaftar pada Pemerintah Kota Sorong yang:
    - (a) menerangkan pelamar merupakan suku asli dalam Kota Sorong;
    - (b) menyebutkan suku dari kedua orang tua pelamar;
- b. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku Papua diluar suku asli Papua dalam Kota Sorong, dibuktikan dengan melampirkan:
  - 1) Akte Kelahiran;

- 2) Surat Keterangan dari Kepala Suku masing-masing yang berkedudukan di Kota Sorong dan terdaftar pada Pemerintah Kota Sorong yang:
  - (a) menerangkan pelamar merupakan suku Papua diluar suku asli dalam Kota Sorong;
  - (b) menyebutkan suku dari kedua orang tua pelamar;
- c. Untuk Kategori III dibuktikan dengan melampirkan:
  - 1) Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/ Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong yang terdaftar pada Pemerintah Kota Sorong menyatakan bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat melalui prosesi adat;
  - 2) Keputusan Bupati tentang penetapan sebagai OAP yang telah diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat.
- d. Untuk Kategori IV meliputi:
  - a. untuk orang yang lahir di Papua dibuktikan dengan Akta Kelahiran; dan/atau
  - b. untuk orang yang besar di Papua, dibuktikan dengan Ijazah SD dan/atau Ijazah SMP dan/atau Ijazah SMA dan/atau Ijazah Sarjana di Papua.

## 2. Bagi Pelamar Klasifikasi Tenaga Kesehatan

- a. Melampirkan STR yang diwajibkan sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
- b. Apabila pelamar tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PPK yang menyatakan bahwa akan memfasilitasi pelamar yang diterima menjadi PNS untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) paling lambat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan lulus.

## III. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal 18 Agustus s.d. 4 September 2024 dengan alur sebagai berikut:

- a. Pelamar membuat akun pada <https://pbpbd-sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
  - 1) Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) pelamar, serta Pelamar menginput data sesuai daerah KTP diterbitkan;
  - 2) Mengisi data identitas sesuai KTP;
  - 3) Mengunggah KTP;
  - 4) Melakukan swafoto;
  - 5) **Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya);**
  - 6) Mencetak Kartu Informasi Akun.
- b. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://pbpbd-sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
- c. Pelamar melengkapi data diri;
- d. Pelamar memilih jenis seleksi yaitu seleksi PNS;
- e. Pelamar hanya dapat memilih instansi Kota Sorong sesuai dengan KTPnya;
- f. Pelamar memilih jenis formasi, pendidikan, klasifikasi formasi yang akan dilamar, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi (sebagaimana dalam lampiran I) dan mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama

- program studi, dan akreditasi;
- g. Pelamar mengunggah:
1. Pas foto terbaru kondisi saat ini dengan resolusi baik menggunakan pakaian formal ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah:
    - Tidak menggunakan make up yang berlebihan;
    - Tidak mengedit/ menggunakan filter berlebihan pada foto;
    - Tidak mengupload foto yang sudah dicetak lalu difoto kembali;
    - Ukuran foto yang terlalu kecil;
    - Tidak memakai aksesoris yang berlebihan;
  2. Surat lamaran yang diketik dan dicetak dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Wali Kota Sorong c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sorong dan ditandatangani dengan tinta hitam diatas materai Rp.10.000,- sesuai format pada Lampiran II;
  3. Dokumen persyaratan umum sesuai dengan ketentuan pada angka Romawi II huruf A;
  4. Dokumen persyaratan khusus sesuai dengan syarat jabatan yang dilamar dengan ketentuan pada angka Romawi II huruf B;
  5. Surat pernyataan data diri pelamar yang berisi 8 (delapan) hal pernyataan ditandatangani diatas materai 10.000 sesuai format pada Lampiran III;
- h. Untuk format surat terkait pendaftaran dimaksud, dapat di unduh pada situs: <https://bit.ly/FormatSurat-CPNS2021>
- i. **Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar dan dokumen terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);** dan
- j. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (**pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali**).

#### IV. TAHAPAN SELEKSI DAN SISTEM KELULUSAN

##### A. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Seleksi administrasi;
2. Seleksi kompetensi dasar, yang memuat :
  - a. Karakteristik Pribadi;
  - b. Intelegensia Umum;
  - c. Wawasan Kebangsaan.
3. Seleksi kompetensi bidang, yang memuat :
  - a. Pengetahuan;
  - b. Keterampilan;
  - c. Perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan Tertentu.

Seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang akan digabung dalam waktu pelaksanaannya serta menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN.

##### B. SISTEM KELULUSAN

1. Seleksi administrasi

Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara persyaratan yang telah ditentukan dengan dokumen yang diunggah/ disampaikan oleh pelamar pada laman <https://pbpbd-sscasn.bkn.go.id>

Hasil seleksi administrasi dimaksud akan diumumkan melalui situs:

- Website : <https://sorongkota.go.id>
- Sosial Media : Facebook Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Sorong
- Situs BKN : <https://pbpbd-sscasn.bkn.go.id>.
- Laman : <https://bit.ly/Pengumuman-CPNS2021>

2. Hasil Akhir Seleksi

Kelulusan akhir seleksi pengadaan PNS Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kota Sorong ditentukan berdasarkan hasil penggabungan nilai dari seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi kemudian dipilih berdasarkan peringkat terbaik.

**V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	17 s.d 31 Agustus 2024
2	Pendaftaran Seleksi	18 Agustus s.d 4 September 2024
3	Seleksi Administrasi	18 Agustus s.d 9 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d 12 September 2024
5	Masa sanggah	13 s.d 15 September 2024
6	Jawab Sanggah	13 s.d 17 September 2024
7	Pengumuman pasca masa sanggah	16 s.d 22 September 2024
8	Penarikan data final	23 s.d 24 September 2024
9	Penjadwalan Seleksi	25 s.d 26 September 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	27 s.d 29 September 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang	30 September s.d 5 Oktober 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang	7 s.d 11 Oktober 2024
13	Pengumuman Hasil	12 s.d 14 Oktober 2024
14	Pengisian DRH NIP CPNS	15 Oktober s.d 3 November 2024
15	Usul Penetapan NIP CPNS	4 s.d 23 November 2024

**VI. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI**

Pelaksanaan seleksi bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMK) Negeri 3 Kota Sorong

**VII. LAIN-LAIN**

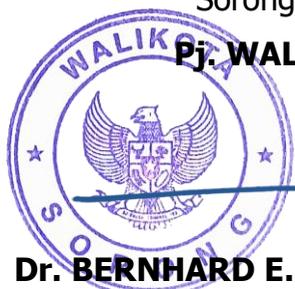
- a. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
- b. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
- c. Panitia seleksi pengadaan PNS Pemerintah Kota Sorong Formasi Tahun 2021 tidak menerima berkas fisik baik secara langsung maupun via pos/paket;
- d. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://pbpbd-sscasn.bkn.go.id> paling lama

- 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan PNS Pemerintah Kota Sorong Formasi Tahun 2021 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
- e. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kota Sorong berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
  - f. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kota Sorong berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
  - g. Apabila usul penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) dari pelamar yang dinyatakan lulus seleksi namun kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) disebabkan adanya persyaratan yang tidak terpenuhi menyangkut keabsahan/legalitas ijazah, kualifikasi pendidikan, maupun usia maka kelulusan pelamar dinyatakan gugur;
  - h. **Pemerintah Kota Sorong tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Sorong atau Panitia sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sorong;**
  - i. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tetapi di kemudian hari:
    - 1) mengundurkan diri;
    - 2) dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
    - 3) terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Menteri;
    - 4) tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
    - 5) meninggal dunia.maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
  - j. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PNS untuk 1 (satu) periode berikutnya;
  - k. Apabila dokter yang memeriksa kesehatan CPNS merekomendasikan bahwa CPNS tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PNS, maka CPNS tersebut diberhentikan;
  - l. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PNS Formasi Tahun 2021 dilingkungan Pemerintah Kota Sorong dapat menghubungi narahubung pada Setiap hari kerja (Senin – Jumat) pukul 08.00 s.d 16.00 WIT melalui:
    - *WhatsApp* : 085251716815
    - Sosial Media : Facebook Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Sorong
    - Email : [datainformasibidang@gmail.com](mailto:datainformasibidang@gmail.com)
  - m. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi pengadaan PNS Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kota Sorong akan diumumkan secara resmi melalui situs:
    - Website : <https://sorongkota.go.id>
    - Sosial Media : Facebook Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Sorong
    - Situs BKN : <https://pbpbid-sscASN.bkn.go.id>.
    - Laman : <https://bit.ly/Pengumuman-CPNS2021>
- Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan

- pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- n. **Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;**
  - o. **Kesalahan peserta dalam mengunggah dokumen pendaftaran menjadi tanggung jawab peserta;**

Demikian untuk menjadi perhatian.

Sorong, 17 Agustus 2024

 **Pj. WALI KOTA SORONG,**  
  
**Dr. BERNHARD E. RONDONUWU, S.Sos., M.Si**

Tembusan:

1. Menteri PAN-RB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Papua Barat Daya di Sorong;
4. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
5. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
6. Ketua DPRD Kota Sorong di Sorong;
7. Inspektur Kota Sorong di Sorong;
8. Kepala BPKAD Kota Sorong di Sorong;
9. Arsip.

**Lampiran I Pengumuman**

Nomor : 800.1.2/1059/BKPSDM/2024

Tanggal : 17 Agustus 2024

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SORONG**

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS MALAWEI	APOTEKER	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS SORONG BARAT	APOTEKER	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS SORONG TIMUR	APOTEKER	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	RSUD SELE BE SOLU	APOTEKER	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
5	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS MALAWEI	S-1 KEBIDANAN / D-IV KEBIDANAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
6	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS REMU	S-1 KEBIDANAN / D-IV KEBIDANAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
7	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS SORONG BARAT	S-1 KEBIDANAN / D-IV KEBIDANAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS KLASAMAN	DOKTER UMUM	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS KLASAMAN	DOKTER UMUM	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS MALANU	DOKTER UMUM	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS MALAWEI	DOKTER UMUM	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS SORONG	DOKTER UMUM	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS SORONG KEPULAUAN	DOKTER UMUM	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS SORONG TIMUR	DOKTER UMUM	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS TANJUNG KASUARI	DOKTER UMUM	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
16	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS MALAIMSIMSA	S-1 EPIDEMIOLOGI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
17	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS MALANU	S-1 EPIDEMIOLOGI	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
18	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS SORONG BARAT	S-1 EPIDEMIOLOGI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
19	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS SORONG KEPULAUAN	S-1 EPIDEMIOLOGI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
20	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS SORONG TIMUR	S-1 EPIDEMIOLOGI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
21	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS TANJUNG KASUARI	S-1 EPIDEMIOLOGI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
22	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	PUSKESMAS SORONG TIMUR	S-1 GIZI / D-IV GIZI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
23	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	PUSKESMAS TANJUNG KASUARI	S-1 GIZI / D-IV GIZI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
24	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	RSUD SELE BE SOLU	S-1 GIZI / D-IV GIZI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
25	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS KLASAMAN	NERS	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
26	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS KLASAMAN	NERS	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
27	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS SORONG BARAT	NERS	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
28	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS SORONG KEPULAUAN	NERS	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
29	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS SORONG TIMUR	NERS	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
30	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS SORONG TIMUR	NERS	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
31	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS TANJUNG KASUARI	NERS	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
32	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS TANJUNG KASUARI	NERS	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
33	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS MALAWEI	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
34	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS SORONG	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
35	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS SORONG BARAT	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
36	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS SORONG KEPULAUAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
37	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS TANJUNG KASUARI	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
38	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS SORONG TIMUR	D-III FARMASI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
39	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS KLASAMAN	D-III KEBIDANAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
40	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS SORONG UTARA	D-III KEBIDANAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
41	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS TANJUNG KASUARI	D-III KEBIDANAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
42	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS TANJUNG KASUARI	D-III KEBIDANAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
43	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS SORONG BARAT	D-III KEPERAWATAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
44	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS SORONG TIMUR	D-III KEPERAWATAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
45	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS TANJUNG KASUARI	D-III KEPERAWATAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
46	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS TANJUNG KASUARI	D-III KEPERAWATAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
47	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS MALAIMSIMSA	D-III ANALIS KESEHATAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
48	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 KOMPUTER	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
49	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA	S-1 PARIWISATA	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
50	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA	S-1 PARIWISATA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
51	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S-1 HUKUM	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
52	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	S-1 HUKUM	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
53	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	S-1 HUKUM	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
54	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	S-1 HUKUM	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
55	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 HUKUM	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
56	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	DINAS PERTANAHAN	S-1 HUKUM	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
57	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	S-1 AGRIBISNIS	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
58	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	S-1 PERIKANAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
59	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
60	AHLI PERTAMA - AUDITOR	INSPEKTORAT	S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
61	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	S-1 PERIKANAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
62	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	S-1 PERIKANAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
63	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	S-1 ARSITEKTUR	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
64	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	S-1 ARSITEKTUR	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
65	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	S-1 TEKNIK SIPIL	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
66	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	S-1 TEKNIK SIPIL	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
67	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	S-1 PLANOLOGI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
68	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
69	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	DINAS PERTANIAN	S-1 PETERNAKAN	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
70	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	DINAS KOPERASI DAN UMKM	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
71	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	DINAS KOPERASI DAN UMKM	S-1 MANAJEMEN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
72	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	S-1 AGRIBISNIS	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
73	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN	S-1 PERIKANAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
74	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
75	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
76	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	DINAS PERINDUSTRIAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
77	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	DINAS PERDAGANGAN	S-1 TEKNIK MESIN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
78	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
79	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
80	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
81	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
82	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	0	0	1	0	0	1
83	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
84	AHLI PERTAMA - PERENCANA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
85	AHLI PERTAMA - PERENCANA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 ARSITEKTUR	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
86	AHLI PERTAMA - POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
87	AHLI PERTAMA - POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
88	AHLI PERTAMA - POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
89	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	S-1 ILMU KOMUNIKASI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
90	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DISTRİK MALAIMSIMSA	S-1 KOMPUTER	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
91	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DISTRİK SORONG KOTA	S-1 KOMPUTER	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
92	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DISTRİK SORONG MANOI	S-1 KOMPUTER	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
93	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DISTRİK SORONG TIMUR	S-1 KOMPUTER	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
94	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DISTRİK SORONG UTARA	S-1 KOMPUTER	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
95	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 SISTEM INFORMASI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
96	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 SISTEM INFORMASI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
97	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 SISTEM INFORMASI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
98	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 SISTEM INFORMASI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
99	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 SISTEM INFORMASI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
100	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
101	TERAMPIL - PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	D-III TEKNIK SIPIL	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
102	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	D-III KOMPUTER	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
103	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D-III KOMPUTER	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
104	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D-III KOMPUTER	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
105	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	D-III KOMPUTER	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
106	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	D-III KOMPUTER	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
107	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	SMK LISTRIK	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
108	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	SMK TEKNIK BANGUNAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
109	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SMK TEKNIK BANGUNAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
110	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	SMK TEKNIK LAS	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
111	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	DINAS PERDAGANGAN	SMK TEKNIK OTOMOTIF	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
112	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	D-IV AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
113	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
114	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
115	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
116	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
117	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
118	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
119	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
120	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
121	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
122	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
123	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PENDIDIKAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
124	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK KLAURUNG	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
125	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
126	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
127	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK KLAURUNG	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
128	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK MALADUM MES	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
129	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK MALADUM MES	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
130	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRİK MALAIMSIMSA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
131	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRİK SORONG	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
132	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRİK SORONG BARAT	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
133	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRİK SORONG KEPULAUAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
134	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRİK SORONG TIMUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
135	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRİK SORONG UTARA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
136	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRİK SORONG UTARA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
137	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
138	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
139	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
140	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
141	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
142	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK SORONG KEPULAUAN	S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
143	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PENDIDIKAN	S-1 ANTROPOLOGI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
144	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PENDIDIKAN	S-1 BAHASA JERMAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
145	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN	S-1 BIOLOGI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
146	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN	S-1 BIOLOGI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
147	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
148	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
149	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PARIWISATA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
150	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PENDIDIKAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
151	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRİK SORONG TIMUR	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
152	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRİK SORONG UTARA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
153	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN	S-1 FISIKA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
154	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERDAGANGAN	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
155	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	S-1 HUKUM	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
156	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 HUKUM	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
157	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS TENAGA KERJA	S-1 HUKUM	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
158	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRİK MALADUM MES	S-1 HUKUM	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
159	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRİK MALAIMSIMSA	S-1 HUKUM	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
160	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK SORONG KOTA	S-1 HUKUM	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
161	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS TENAGA KERJA	S-1 ILMU KOMUNIKASI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
162	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS TENAGA KERJA	S-1 ILMU KOMUNIKASI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
163	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS TENAGA KERJA	S-1 ILMU KOMUNIKASI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
164	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS TENAGA KERJA	S-1 ILMU KOMUNIKASI	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
165	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS TENAGA KERJA	S-1 ILMU KOMUNIKASI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
166	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
167	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
168	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
169	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
170	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
171	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
172	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PARIWISATA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
173	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
174	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERTANAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
175	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK SORONG	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
176	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S-1 ILMU POLITIK	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
177	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK KLAURUNG	S-1 ILMU POLITIK	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
178	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK KLAURUNG	S-1 ILMU POLITIK	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
179	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK SORONG BARAT	S-1 ILMU POLITIK	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
180	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK SORONG KEPULAUAN	S-1 ILMU POLITIK	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
181	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK SORONG KOTA	S-1 ILMU POLITIK	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
182	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN	S-1 KEHUTANAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
183	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN	S-1 KEHUTANAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
184	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN	S-1 KEHUTANAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
185	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS TENAGA KERJA	S-1 KOMPUTER	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
186	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	S-1 MANAJEMEN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
187	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 MANAJEMEN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
188	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 MANAJEMEN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
189	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 MANAJEMEN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
190	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 MANAJEMEN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
191	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS KESEHATAN	S-1 MANAJEMEN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
192	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
193	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 MANAJEMEN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
194	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 MANAJEMEN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
195	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 MANAJEMEN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
196	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	S-1 MANAJEMEN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
197	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERTANAHAN	S-1 MANAJEMEN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
198	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS SOSIAL	S-1 MANAJEMEN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
199	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS TENAGA KERJA	S-1 MANAJEMEN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
200	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK SORONG	S-1 MANAJEMEN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
201	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK SORONG KEPULAUAN	S-1 MANAJEMEN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
202	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DISTRIK SORONG UTARA	S-1 MANAJEMEN	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
203	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
204	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
205	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 PERPAJAKAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
206	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERTANIAN	S-1 PETERNAKAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
207	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERTANIAN	S-1 PETERNAKAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
208	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	S-1 PLANOLOGI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
209	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERTANAHAN	S-1 PLANOLOGI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
210	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	S-1 SISTEM INFORMASI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
211	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 SISTEM INFORMASI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
212	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 SISTEM INFORMASI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
213	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	S-1 SISTEM INFORMASI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
214	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	S-1 SISTEM INFORMASI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
215	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 SOSIOLOGI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
216	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 SOSIOLOGI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
217	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S-1 SOSIOLOGI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
218	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 STATISTIK	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
219	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 STATISTIK	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
220	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PENDIDIKAN	S-1 STATISTIKA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
221	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	S-1 TEKNIK GEOLOGI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
222	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK GEOLOGI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
223	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
224	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
225	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
226	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
227	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
228	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERDAGANGAN	S-1 TEKNIK MESIN	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
229	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN	S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
230	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN	S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
231	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN	S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
232	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN	S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
233	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
234	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
235	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
236	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
237	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
238	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
239	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
240	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS SOSIAL	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
241	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DISTRIK MALADUM MES	SLTA SEDERAJAT	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
242	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN DUM BARAT	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	0	0	0	1	0	1
243	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN DUM TIMUR	SLTA SEDERAJAT	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
244	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN KALASUAT	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
245	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN KLABLIM	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
246	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN KLADEMAK	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
247	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN KLAUFU	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
248	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN KLAGETE	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
249	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN KLAMANA	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
250	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN KLASABI	SLTA SEDERAJAT	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
251	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN KLAVALU	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
252	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN KLAWASI	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
253	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN KLAWUYUK	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
254	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN MALASILEN	SLTA SEDERAJAT	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
255	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN MATAMALAGI	SLTA SEDERAJAT	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
256	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN PAL PUTIH	SLTA SEDERAJAT	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
257	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN PUNCAK CENDERAWASIH	SLTA SEDERAJAT	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
258	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN RAM	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	0	0	1	0	0	1
259	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN REMU	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
260	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN REMU UTARA	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
261	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN SAOKA	SLTA SEDERAJAT	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
262	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN SAWAGUMU	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
263	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN SOOP	SLTA SEDERAJAT	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
264	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN SUPRAU	SLTA SEDERAJAT	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
265	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN TANJUNG KASUARI	SLTA SEDERAJAT	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
266	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN KLAKUBLIK	SMK ADMINISTRASI PERKANTORAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
267	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN KLALIGI	SMK ADMINISTRASI PERKANTORAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
268	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PERTANIAN	SMK AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
269	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN KLABALA	SMK AKUNTANSI DAN KEUANGAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
270	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN MALANU	SMK AKUNTANSI DAN KEUANGAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
271	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	SMK MULTIMEDIA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
272	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	D-III TEKNIK MESIN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
273	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	DINAS PERHUBUNGAN	D-III TEKNIK MESIN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
274	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	D-III EKONOMI AKUNTANSI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
275	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS KOPERASI DAN UMKM	D-III EKONOMI AKUNTANSI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
276	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PENDIDIKAN	D-III EKONOMI AKUNTANSI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
277	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PENDIDIKAN	D-III EKONOMI AKUNTANSI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
278	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PERTANAHAN	D-III EKONOMI AKUNTANSI	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
279	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PERTANAHAN	D-III EKONOMI AKUNTANSI	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					JUMLAH_FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
					OAP				DILUAR OAP (NON OAP)	
					OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI I DAN II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP KATEGORI III YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP KATEGORI IV YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA		
280	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	KELURAHAN KLASAMAN	D-III MANAJEMEN KEUANGAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
281	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	D-III MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
282	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	D-III MANAJEMEN PERPAJAKAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH;	1	0	0	0	0	1
283	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PARIWISATA	D-III PARIWISATA	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
284	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PERINDUSTRIAN	D-III TEKNIK PERTAMBANGAN	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1
285	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	D-III TEKNIK SIPIL	NON-OAP YANG BUKAN KATEGORI I, II, III, DAN IV	0	0	0	0	1	1
286	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	D-III TEKNIK SIPIL	OAP KATEGORI I DAN KATEGORI II YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DILUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH;	0	1	0	0	0	1



Pj. WALI KOTA SORONG,

Dr. BERNHARD E. RONDONUWU, S.Sos., M.Si

**Lampiran II Pengumuman**

Nomor : 800.1.2/1059/BKPSDM/2024

Tanggal : 17 Agustus 2024

DIKETIK DAN DICETAK MENGGUNAKAN  
TINTA WARNA HITAM

Sorong, 18 Agustus 2024

Perihal : Permohonan menjadi PNS Pemerintah Kota Sorong

Yth.

Pj. Wali Kota Sorong

c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Sorong

di-

Sorong

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nama Lengkap**  
NIK :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis Kelamin : **Laki-laki / Perempuan (Pilih Salah satu)**  
Pendidikan : **(S-1 Ilmu Komputer/ D-III Akuntansi/ SMA)**  
Jabatan yang dilamar :  
Unit kerja yang dilamar :  
Jenis Kebutuhan : **OAP / NON OAP (Pilih Salah satu)**  
Alamat : **Alamat Lengkap sesuai KTP**  
Nomor HP :  
Alamat email :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat menjadi PNS Pemerintah Kota Sorong Tahun 2021.

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan persyaratan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah;
3. Ijazah asli;
4. Transkrip Nilai asli;
5. Surat pernyataan Data Diri Pelamar yang ditandatangani di atas materai 10.000;
6. Bukti akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
7. Akta kelahiran; *(hanya berlaku bagi OAP Kategori I, II dan IV)*
8. Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong yang terdaftar pada Pemerintah Kota Sorong yang menyatakan bahwa pelamar adalah Orang Asli Papua dari suku dalam Kota Sorong; *(hanya berlaku bagi OAP Kategori I dan II yang berasal dari suku asli Papua dalam Kota Sorong)*
9. Surat Keterangan dari Kepala Suku masing-masing yang berkedudukan di Kota Sorong dan terdaftar pada Pemerintah Kota Sorong; *(hanya berlaku bagi OAP Kategori I dan II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam Kota Sorong)*
10. Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong yang terdaftar pada Pemerintah Kota Sorong menyatakan bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat melalui prosesi adat; *(hanya berlaku bagi OAP Kategori III)*
11. Surat keputusan Bupati tentang penetapan sebagai OAP yang telah diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat; *(hanya berlaku bagi OAP Kategori III)*
12. Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku; *(hanya berlaku bagi pelamar jabatan Tenaga Kesehatan)*

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PNS Kota Sorong Tahun Anggaran 2021.

Hormat Saya,

*Materai*  
*Rp.10.000*

**(Nama Lengkap)**

### **SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :  
Nomor HP :  
Email :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN, BUMD);
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Kota Sorong; dan
8. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Sorong dan tidak mengajukan pindah keluar dari Kota Sorong dengan alasan pribadi paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak diangkat sebagai CPNS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Sorong, 18 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

*Materai*  
*Rp.10.000*

**(NAMA LENGKAP)**